

EVALUASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) PADA MASYARAKAT KURANG MAMPU DI DESA TEBING TANJUNG SELAMAT KECAMATAN PADANG TUALANG KABUPATEN LANGKAT

Ramadani^{1*}, R. Sally Marisa Sihombing²

^{1,2} Universitas Sumatera Utara, Indonesia

*Korespondensi : Ramadanidani810@gmail.com

ABSTRAK

Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan program bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kualitas pangan melalui pemberian bahan pangan dengan gizi yang seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui dan mendeskripsikan evaluasi program bantuan pangan non tunai pada masyarakat yang kurang mampu di Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Tebing Tanjung Selamat masih belum efektif karena tidak sesuainya antara hasil yang dicapai dengan tujuan program yang telah ditentukan. *Kedua*, perubahan mekanisme penyaluran melalui uang tunai maka waktu yang dibutuhkan, tenaga yang dikeluarkan dan biaya operasional yang diperlukan menjadi lebih hemat dan lebih sedikit. *Ketiga*, masyarakat puas dan senang dengan mekanisme saat ini. *Keempat*, Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Tebing Tanjung Selamat sudah merata dan adil dibagikan pada kelompok penerima manfaat tanpa dibeda-bedakan. *Kelima*, responsivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai belum optimal karena proses pengajuan nama baru membutuhkan waktu yang lama. *Keenam*, pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Tebing Tanjung Selamat masih belum tepat sasaran karena masih didapati keluarga penerima manfaat diluar kategori miskin masih mendapatkan bantuan.

Kata Kunci : *Evaluasi, Program Bantuan Pangan Non Tunai, Kebijakan.*

ABSTRACT

The Non-Cash Food Assistance Programme is a social assistance programme provided to poor communities with the aim of improving food quality through the provision of food with balanced nutrition. This study aims to know and describe the evaluation of non-cash food assistance programmes in underprivileged communities in Tebing Tanjung Selamat Village, Padang Tualang District, Langkat Regency. This research uses descriptive research methods with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, documentation, and literature study. The results of the research show that the implementation of the Non-Cash Food Assistance Programme in Tebing Tanjung Selamat Village is still not effective because it does not match the results achieved with the objectives of the programme that have been determined.

Secondly, the change in the distribution mechanism through cash means that the time required, the labour expended, and the operational costs are more efficient and less. Third, the community is satisfied and happy with the current mechanism. Fourth, the Non-Cash Food Assistance Programme in Tebing Tanjung Selamat Village has been evenly and fairly distributed to beneficiary groups without discrimination. Fifth, the responsiveness of the Non-Cash Food Assistance Programme is not optimal because the process of applying for a new name takes a long time. Sixth, the implementation of the Non-Cash Food Assistance Programme in Tebing Tanjung Selamat Village is still not well-targeted because there are still beneficiary families outside the poor category who receive assistance.

Keywords : Evaluation: Non-Cash Food Assistance Programme; Policy

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan kompleks dan mendasar yang dialami oleh berbagai negara di belahan dunia. *World Bank* (2023) mengemukakan data bahwa Hampir 700 juta orang di seluruh dunia saat ini hidup dalam kemiskinan ekstrim. Salah satu penyebab kemiskinan ekstrim ini yaitu Pandemi Covid 19 yang mulai eksis di penghujung tahun 2019. Krisis COVID-19 menyebabkan kemunduran terbesar dalam pengentasan kemiskinan global dalam beberapa dekade (*United Nations*, 2023). Salah satu negara yang terkena dampak yang signifikan adalah Indonesia. Implikasi dari adanya pandemi Covid 19 di Indonesia yaitu mengurangi kemajuan terakhir dalam pengurangan kemiskinan, dari angka terendah yang pernah dicapai yaitu 9,2 persen pada September 2019 menjadi 9,7 persen pada September 2021. Berdasarkan data BPS (2022), jumlah penduduk miskin tertinggi menyentuh angka lebih dari 4 juta jiwa. hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Daftar 10 Provinsi Dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak Di Indonesia

No	PROVINSI	JUMLAH PENDUDUK MISKIN
1	Jawa Timur	4.236.510 Jiwa
2	Jawa Barat	4.052.620 Jiwa
3	Jawa Tengah	3.858.230 Jiwa
4	Sumatera Utara	1.262.090 Jiwa
5	Nusa Tenggara Timur	1.149.170 Jiwa
6	Lampung	995.590 Jiwa
7	Papua	936.320 Jiwa
8	Banten	829.660 Jiwa
9	Aceh	818.470 Jiwa
10	Sulawesi Selatan	782.320 Jiwa

Sumber: Data BPS Per September, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Provinsi Sumatera Utara menduduki peringkat ke empat dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.262.090 jiwa. Salah satu daerah yang terletak di Provinsi Sumatera Utara adalah Kabupaten Langkat. Adapun Presentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat Tabel 1.2

Tabel 1.2 Presentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten / Kota	Presentase Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota (Persen)		
	2020	2021	2022
Langkat	9,73	10,12	9,49
Nias	16,60	16,82	16,00
Deli Serdang	3,88	4,01	3,62
Tebing Tinggi	9,85	10,30	9,59
Binjai	5,71	5,81	5,10

Sumber: Data BPS Pemprov Sumatera Utara, 2022

Berdasarkan tabel 1.2, dapat dilihat bahwa Kabupaten Langkat Dalam tiga tahun terakhir, persentase penduduk miskin tahun 2022 menempati angka terendah dibanding tahun-tahun sebelumnya.

World food Programme (2023) menyatakan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai SDGs

dengan target yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Hal ini bertujuan untuk dapat menurunkan proporsi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan tingkat sedang hingga berat dari lima persen pada tahun 2020 menjadi empat persen pada tahun 2024.

Adapun salah satu upaya pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu dengan membuat suatu kebijakan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai atau disingkat BPNT yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai dan PERMENSOS RI No.20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Program BPNT sumber anggaran sepenuhnya bersumber dari APBN dan APBD sesuai kemampuan daerahnya masing-masing.

Tabel 1.3 Anggaran Pemerintah Untuk Program BPNT di Indonesia

Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran	Jumlah Target KPM
2017	1,69 T	1,2 Juta KPM
2018	7,72 T	10 Juta KPM
2019	34,4 T	15,6 Juta KPM
2020	37,4 T	15,2 Juta KPM
2021	48,6 T	18,8 Juta KPM
2022	14,1 T	18,8 Juta KPM
2023	45,1 T	15,6 Juta KPM

Sumber: Kemenkeu.go.id, 2023

Adapun tujuan BPNT yaitu pemenuhan sebagian kebutuhan pangan; kedua memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM BPNT; ketiga memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan keempat memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan

pangannya.

Pada wilayah Kabupaten Langkat program BPNT mulai disahkan dan dijalankan pada tahun 2018. Proses penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengacu pada Peraturan Presiden RI No. 63 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki Perda tentang BPNT hal ini dikarenakan dalam penyaluran dan penerapannya BPNT bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Adapun perda yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan bantuan sosial di Sumatera Utara berlandaskan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 19 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Berdasarkan keterangan dari sekretaris Desa Tebinganjung Selamat, mengatakan bahwa terkait dengan program BPNT ini banyak mendapatkan keluhan dari KPM (kelompok penerima manfaat) karena untuk bahan pangan yang diberikan oleh KPM sudah ditentukan dan tidak bisa dipilih sesuai kemauan KPM, jadi sebagian KPM merasa membutuhkan bahan pokok lain namun yang didapat lain lagi. Biasanya bahan pangan yang didapatkan oleh KPM berupa beras, telur, kacang panjang dan tempe. Jadi karena itulah KPM banyak mengeluh akibat tidak sesuai dengan kemauannya.

Selanjutnya terkait penerima manfaat banyak keluhan masyarakat yang merasa kurang tepat sasaran. Pada proses penentuan penerima Program BPNT ini pihak desa hanya mengusulkan nama nama saja, sedangkan yang memverifikasi adalah pihak dinas sosial.

Tabel 1.4 Jumlah Penerima Program BPNT Sejak Tahun 2018 Hingga Saat Ini di Desa Tebing Tanjung Selamat

Nama Program	Jumlah Penerima
Program BPNT	253 Jiwa
Program PKH	242 Jiwa
Jumlah	495 jiwa

Sumber: Data Penerima Bantuan Desa Tebing Tanjung Selamat, 2023

Proses pencairan bantuan BPNT sudah dalam bentuk tunai dan dicairkan melalui kantor pos yang ada di daerah Batang Serangan. Kemudian berdasarkan keterangan Sekretaris Desa Tebing Tanjung Selamat juga mengatakan bahwasannya mulai tahun 2023 ini proses pencairan BPNT di desa Tebing Tanjung Selamat sudah tidak melalui e-warong lagi, karena sekarang sudah langsung melalui Kantor Pos dalam bentuk tunai. Temuan lain juga pada saat pencairan program BPNT ini per 3 bulan baru dicairkan sebesar 600 ribu. Dan waktu pencairannya juga tidak pasti berkisar antara tanggal 15-25 dipertengahan bulan.

Seharusnya berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan secara non tunai oleh pemerintah kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik yang kemudian digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.

Tabel 1.5 Jumlah E-warong Yang Ada Di Desa Tebing Tanjung Selamat

Letak E-warong	Jumlah E-warong
Dusun 9 Benteng Sari	1 E-warong
Dusun 11 Tegal Rejo	1 E-warong

Sumber: Data Kantor Desa Tebing Tanjung Selamat, 2023

Pernyataan ini dapat dilihat dalam Permensos No. 20 tahun 2019 pasal 23 ayat (1 dan 2). Pada pasal tersebut

menjelaskan bahwa dalam penyaluran program BPNT tidak dapat diambil secara tunai. Akan tetapi, pada pencairan BPNT 2023 di Desa Tebing Tanjung Selamat dilakukan pencairan secara tunai melalui Kantor Pos.

Hal ini bertujuan untuk percepatan bansos yang berlandaskan Perpres No 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial yang bisa di cairkan dalam bentuk tunai. Jika program BPNT dicairkan dalam bentuk tunai maka besar kemungkinan uang yang diperoleh oleh KPM digunakan untuk keperluan lain.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dikarenakan lokasi penelitian ini, belum pernah diteliti sebelumnya, selain itu terdapat perbedaan teori yang digunakan yang dimana pada penelitian ini menggunakan teori evaluasi program yang dikemukakan oleh William n Dunn.

Sudiro (2018:83) berpendapat bahwa evaluasi ialah proses dalam membuktikan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dari suatu program yang telah dilaksanakan. Menurut Willam N. Dunn (2003:610) terdapat enam kriteria evaluasi program yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.

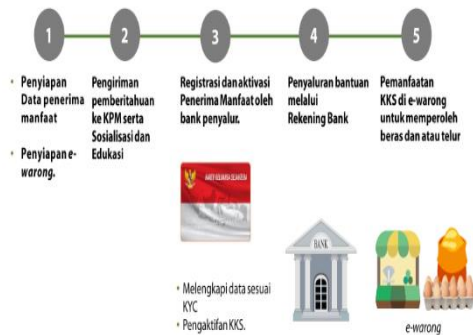
B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif Creswell (2015:4) menyebutkan metode penelitian kualitatif adalah bentuk sebuah penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Lokasi Penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu data primer melalui

wawancara dan observasi, dan data data sekunder yaitu melalui studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mereduksi data, yang dilanjutkan dengan penyajian data dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

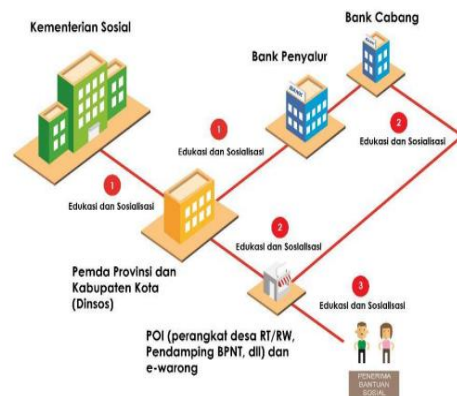
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebuah program bantuan yang diluncurkan oleh pemerintah yang disalurkan dalam bentuk non tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya sebesar Rp. 200.000, melalui sistem uang elektronik yang ada di kartu keluarga sejahtera (KKS) yang kemudian uang elektronik ini hanya dapat dicairkan dengan membeli bahan pangan yang telah di tentukan di *e-warong* yang sudah bekerja sama dengan bank penyalur. *E-warong* (elektronik warung gotong royong) adalah usaha atau kedai-kedai sembako yang ada di desa.



Gambar 4.6 Mekanisme BPNT

Sumber: Kemensos.go.id, 2023

Adapun alur sosialisasi BPNT yaitu sebagai berikut:



Gambar 4.7 Alur Sosialisasi BPNT

Sumber: Kemensos.go.id, 2023

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Julianto (2020), mendapati hasil bahwa bantuan yang diberikan pemerintah telah dilaksanakan secara terstruktur, tepat sasaran, tepat waktu dan mengurangi beban masyarakat miskin dalam hal pengeluaran serta dapat membantu ketahanan pangan masyarakat miskin. Akan tetapi, pada penelitian ini, terdapat beberapa perbedaan. Hal tersebut akan dipaparkan di bawah ini.

1. Efektivitas (*Effectiveness*)

Menurut Rusdiana (2022:153) Efektivitas adalah suatu ukuran untuk melihat seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai. Efektivitas dapat juga dinyatakan sebagai pencapaian suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam efektivitas selalu berkenaan dengan apakah suatu alternatif dapat mencapai hasil yang diinginkan. Wilayah Kabupaten Langkat secara tujuan program BPNT belum mencapai tujuan sepenuhnya. Karena, dalam pelaksanaannya masih terjadi ketidak tepat sasaran program akibat faktor SDM yang rendah dan ketidak akuratan data kelompok penerima manfaat.

Berdasarkan temuan dilapangan

pihak operator desa sebagai petugas operator data terpadu kesajahteraan sosial (DTK) yang bertugas untuk mengupload dan mensinkronkan data setiap bulannya tidak mendapatkan gaji. Jadi dalam hal ini mereka mendapatkan peran sebagai operator desa dan operator DTKS, tetapi mereka tidak mendapatkan *double* gaji.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohana Tiara dan Mardianto (2019) yang berjudul Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang belum efektif dikatakan karena telah membandingkan antara hasil wawancara dengan hasil kuesioner yang sudah berjalan dengan baik, namun masih masih ditemukan beberapa masalah dan hambatan.

Selanjutnya juga penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asrin Dkk. (2022) yang berjudul Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Baadia Kota Baubau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk indikator efektivitas secara keseluruhan dapat disimpulkan belum cukup efektif hal ini dapat dilihat dari penambahan masyarakat miskin.

2. Efisiensi (*Efficiency*)

Efisiensi merupakan penggunaan optimal *input* suatu program/kebijakan maupun organisasi untuk dapat menghasilkan *output* yang maksimal, dengan cara mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki (Irwandy, 2019: 36). Efisiensi dalam hal ini berkaitan dengan jumlah usaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu

atau mencapai hasil yang diinginkan. Waktu pencairan BPNT dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan waktu pencairan yang berubah-ubah.

Tabel 4.5 Tahap Pencairan BPNT Desa Tebing Tanjung Selamat

Tanggal/Bulan	Tahun	Tahap Pencairan
17 Maret	2023	I
18 Juni	2023	II
21 September	2023	III

Sumber: Kantor Desa Tebing Tanjung Selamat, 2023

Program BPNT dicairkan melalui kantor Pos dalam bentuk tunai maka, secara tidak langsung dalam proses pendistribusian program terjadi pengurangan dan penghematan waktu, biaya dan sumber daya yang digunakan. Sehingga, secara waktu jauh lebih efisien dan cepat sampai kepada KPM, dari tenaga yang digunakan juga tidak begitu banyak menggunakan pekerja dalam proses penyaluran program. Hal ini sangat berbanding terbalik ketika program BPNT disalurkan melalui *e-warong* yang membutuhkan waktu berhari-hari untuk mendistribusikan bahan pangan ke seluruh *e-warong* yang ada di desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lorena Dkk. (2023) yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk indikator efisiensi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Negeri Tawiri cukup berjalan dengan baik namun belum maksimal, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya belum tepat waktu dan juga ada beberapa kendala seperti masih ada masyarakat sebagai KPM yang tidak mendapatkan informasi

3. Kecukupan (*Adequacy*)

Kecukupan dapat dikatakan sebagai sejauh mana tingkat efektivitas dalam rangka memecahkan suatu masalah untuk dapat memuaskan kebutuhan, nilai ataupun kesempatan yang menumbuhkan masalah (Sawir, 2021: 204). Pada program BPNT di Desa Tebing Tanjung Selamat dilihat dari indikator kecukupan, bermakna bahwa apakah tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal dan juga bagaimana program BPNT ini mampu memberikan kepuasan yang signifikan terhadap penerima manfaat yang ada di Desa Tebing Tanjung Selamat. Berdasarkan temuan peneliti dilapangan untuk jumlah besaran bantuan yang diterimah oleh kelompok penerima manfaat (KPM) dalam bentuk tunai adalah sebesar 600 ribu. Besaran bantuan yang diterima ini unktuk priode tiga bulan, yang artinya setiap bulannya kelompok penerima manfaat (KPM) di Desa Tebing Tanjung Selamat mendapatkan besaran iuran BPNT 200 ribu/bulan.

Tabel.4.6 Jumlah Anggaran BPNT Desa Tebing Tanjung Selamat yang Diterima Kantor Pos Batang Serangan 2023

Bulan	Tahap Pencairan	Jumlah Penerima BPNT	Jumlah Anggaran Yang Diterima
Maret	Tahap I	253 Jiwa	Rp. 151.800.000
Juni	Tahap II	253 Jiwa	Rp. 151.800.000
September	Tahap III	253 Jiwa	Rp. 151.800.000

Sumber: Kantor Pos Batang Serangan, 2023

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diketahui bahwa kelompok penerima manfaat BPNT di Desa Tebing Tanjung Selamat merasa sangat terbantu dengan adanya program bantuan ini, walaupun dicairkan setiap tiga bulan sekali bagi mereka hal tersebut sudah sangat membantu disaat-saat yang dibutuhkan.

Jika dibandingkan seperti pencairan BPNT melalui *e-warong* sebelumnya maka, bagi masyarakat penerima program lebih merasa senang dan terbantu dengan mekanisme penyaluran saat ini.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suci Laurentcia dan Rahmadani Yusran (2021) yang berjudul Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bawa untuk indikator kecukupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan implementor menilai bahwa besaran manfaat yang diberikan setiap bulannya belum bisa mencukupi kebutuhan pangan KPM selama satu bulan.

Selanjutnya penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Firdaus, Dkk. (2022). Dengan judul Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bengkalis: Suatu Evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk indikator ketepatangunaan/kecukupan dapat dilihat melalui pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini cukup memudahkan masyarakat miskin.

4. Perataan (*Equity*)

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan sebagai keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik (Tohardi, 2023:196). Perataan dalam hal ini mengandung makna sebagai sebuah manfaat dan tarif biaya dari kegiatan yang berkaitan dengan program dan apakah suatu hal yang ada didalam program itu telah dibagikan sesuai porsi yang sama bagi kalangan yang terlibat didalamnya

Tujuan kelompok sasaran program BPNT di Desa Tebing Tanjung Selamat

adalah kelompok miskin dan rentan miskin jika memenuhi standar kelayakan. Dari segi manfaat yang dihasilkan, semua KPM merasakan manfaat yang sama yaitu dapat dengan bebas membelanjakan uangnya untuk kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup lainnya. Untuk *output* (manfaat langsung yang dihasilkan) program BPNT dengan uang 600 ribu hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup sebulan saja. Karena tidak sampai satu bulan uang hasil BPNT sudah habis digunakan oleh KPM.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mitha Tri Meilani, Dkk. (2022) dengan judul Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2022 Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk indikator pemerataan program belum optimal karena mengenai pemerataan fasilitas penunjang pelaksanaan kebijakan belum tersebar merata terdapat 1 (satu) *E-warong* yang ada di Desa Kalijati.

Kemudian penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lorena K. Siregar. (2023). Dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk dimensi Pemerataan dilihat dari indikator jenis manfaat yang diperoleh bahwa pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini memberikan manfaat yang positif, khususnya pada masyarakat kurang mampu sebagai KPM.

5. Responsivitas (*Responsiveness*)

Responsivitas adalah kemampuan pemerintah/ organisasi untuk

mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan dan mengembangkannya dalam berbagai pelayanan (Nawi, 2017: 9). Persoalan dalam hal ini yaitu ketika ada pergantian KPM yang dilakukan dengan menghapus KPM prosesnya sangat cepat dilakukan namun, ketika mengusulkan nama baru dapat memakan waktu yang cukup lama bahkan sampai satu tahun. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pihak dinas sosial yaitu Kabid Pelayanan dan Penanganan Kemiskinan dibawah ini.

“Harusnya yang lebih procedural itu pengaduan dilakukan kepada pihak desa dulu, apabila nanti dirasa pihak desa tidak menemukan solusi bisa saja nanti berkordinasi dengan pihak dinsos untuk apa saja langkahlangkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan bansos ini” (B.W, Wawancara 27 September 2023)

Disisi lain untuk proses pelayanan terkait perbaikan data DTKS baik di tingkat desa maupun dinas sosial sudah dirasa cukup baik karena masyarakat yang mengadukan permasalahannya langsung mendapatkan pelayanan yang diinginkan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Daniar Seri Firdausi dan Diana Hertati (2022) yang berjudul Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait indikator responsivitas menjelaskan bahwa masyarakat cukup merasa puas dengan bantuan yang ada.

6. Ketepatan (*Accuracy*)

Ketepatan adalah kriteria yang digunakan untuk dapat menyeleksi

sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi (Tohardi, 2023:196-197). Ketepatan dalam hal ini berarti untuk melihat sejauh mana ketepatan program BPNT di Desa Tebing Tanjung Selamat dapat dilihat melalui ketepatan sasaran dan ketepatan manfaat program yang dirasakan oleh kelompok penerima manfaat (KPM). Berdasarkan ketentuan Permensos No.20 tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT). Untuk sasaran tujuan program BPNT adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan.

Berdasarkan ketentuan Permensos No.20 tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT). Untuk sasaran tujuan program BPNT adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Namun, menurut keterangan yang diperoleh melalui wawancara dengan Kaur Kesra Desa Tebing Tanjung Selamat, ketidak tepat sasaran menjadi persoalan dalam pelaksanaan program BPNT di desa ini.

Disisi lain pengawasan dan pengecekan rutin oleh pemerintah kabupaten/kota di desa diperlukan guna meminimalisis ketidak tepat sasaran program. Karena semakin sering dan rutin pengawasan dilakukan maka program BPNT akan jauh lebih tepat sasaran dan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Tindakan-tindakan penyimpangan juga semakin dapat dinetralisir jika hal ini dilakukan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Daniar Seri Firdausi dan Diana Hertati (2022) yang berjudul Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Glagahan Kecamatan Perak

Kabupaten Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait indikator ketepatan dalam program BPNT sangat bermanfaat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi mereka meskipun bantuan yang diberikan tidak sebanding dengan kebutuhan pangannya hingga bulan selanjutnya.

D. KESIMPULAN

a. Efektivitas

Pelaksanaan program BPNT di Desa Tebing Tanjung Selamat masih belum efektif karena tidak sesuai dengan hasil yang dicapai dengan tujuan program yang telah ditentukan sebelumnya

b. Efisiensi

Terkait indikator efisiensi Program BPNT di Desa Tebing Tanjung Selamat dapat dikatakan efisien. Karena ketika penyaluran menggunakan mekanisme uang tunai lewat kantor Pos maka waktu yang dibutuhkan, tenaga yang dikeluarkan dan biaya operasional yang diperlukan menjadi lebih hemat dan lebih sedikit dibandingkan dengan pencairan dalam bentuk bahan pangan di *e-warong* dan manfaat yang diterima juga lebih cepat sampai kepada penerima program.

c. Kecukupan

Terkait indikator kecukupan program BPNT di Desa Tebing Tanjung Selamat sudah cukup baik karena masyarakat merasa senang dan puas dengan mekanisme penyaluran BPNT dalam bentuk tunai sebesar 200 ribu perbulan atau 600 ribu dalam priode tiga bulan sekali.

d. Perataan

Program BPNT di Desa Tebing Tanjung Selamat sudah merata dan adil dibagikan pada kelompok penerima manfaat (KPM). Semua kelompok penerima manfaat mendapatkan bantuan yang sama sebesar 600 ribu/3 bulan. Responsivitas

Dari segi responsivitas program BPNT di Desa Tebing Tanjung Selamat masih kurang responsive karena kecepatan pelayanan masih belum maksimal yang dapat dilihat pada saat proses pengajuan/pengusulan nama baru penerima program membutuhkan waktu yang lama sampai setahun.

e. Perataan

Program BPNT di Desa Tebing Tanjung Selamat sudah merata dan adil dibagikan pada kelompok penerima manfaat (KPM). Semua kelompok penerima manfaat mendapatkan bantuan yang sama sebesar 600 ribu/3 bulan.

f. Ketepatan

Terkait indikator ketepatan program BPNT di Desa Tebing Tanjung Selamat masih belum optimal karena masih terjadi ketidak tepatan sasaran program. Masih ada ditemui kondisi rumah kelompok penerima manfaat (KPM) yang sangat layak dan ekonominya juga tidak terlalu miskin namun masih menerima bantuan BPNT.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Asrin, A., Acmad, F. Y., & Sadat, A. (2022). Evaluasi Kebijakan BPNT

Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Baadia Kota Baubau. *Journal of Government Science Studies*, 1(2), 86-94.

Creswell, J.W. 2015. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Edisi kedua. Yogyakarta: Gadj Mada University Press.

Irwandy. 2019. *Efisiensi dan Produktifitas Rumah Sakit: Teori dan Aplikasi Pengukuran dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGN)

Nawi, Rusdin. 2017. *Perilaku Kebijakan Organisasi*. Makassar: CV Sah Media.

Rusdiana, A. 2022. *Manajemen Kewirausahaan Kontemporer Pendekatan Teori dan Praktek*. Banten: Arsad Press

Sawir, Muhammad. 2021. *Buku Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik*. Yogyakarta: CV Budi Utama

Sudiro. 2018. *Evaluasi Kebijakan Pendidikan. Teori, Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Lontar Mediatama

Tohardi, Ahmad. 2023. *Metodologi penelitian peternakan*. Ponorogo: CV. Uwais Inspirasi Indonesia

Firdausi, Daniar Seri dan Diana Hertati. (2022). *Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Glagahan Kecamatan Perak*

- Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 1126-1132.
- Julianto, P. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci. *Qawwam: Tulisan Pemimpin*, 1 (1), 38-43.
- Laurentcia, S., & Yusran, R. (2021). Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Nanggalo Kota Padang. *Journal of civic Education*, 4(1), 7-17.
- Meilani, Mitha Dkk. 2022. Evaluasi kebijakan program bantuan pangan non tunai tahun 2022 dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat desa kalijati kecamatan sidamulih kabupaten pangandaran. *Jurnal Manajemen Publik*. 1(2), 49-60.
- Siregar, L. K., Pattimukay, H. V. R., & Waisapy, J. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. *Mimbar Administrasi*, 20(1), 127-138.
- Tiara, R., & Mardiyanto, M. (2019). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang. *Demography Journal of Sriwijaya (DeJoS)*, 3(1), 36-44.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 19 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD
- PERMENSOS RI No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran BPNT
- PERPRES No. 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai
- Kemenkeu.go.id. 2023. Indeks Manfaat Program Sembako. Diakses pada 4 Juli 2023. Melalui: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/kaltim/id/data-publikasi/pub/pengumuman/2916-indeks-manfaat-program-sembako.html>
- Kemensos.go.id. 2023. Kenali Lebih Dekat Program Bantuan Pangan non Tunai. Diakses pada tanggal 30 Maret 2023 melalui <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://kemensos.go.id/uploads/topics/15664651387355.pdf&ved=2ahUKEwjuzsrH2MOEAxUj1TgGHe-oBswQFnoECBwQAQ&usg=AOvVaw0P9ESkSLvD4ZCIFmPgkjd->
- Sumut.bps.go.id. 2022. Data Jumlah Penduduk Miskin Disumatera Utara. Diakses Pada 31 maret 2022 melalui: <https://sumut.bps.go.id/indicator/23/73/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kab-kota.html>
- United Nations. 2023. Ending Poverty. Diakses pada tanggal 31 Maret 2023 melalui <https://www.un.org/en/global-issues/ending-poverty>
- Word Bank. 2023. Poverty. Diakses pada tanggal 31 Maret 2023 melalui <https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview#:~:text=Almost%20700%20million%20people%20around,live%20in%20Sub%2DSaharan%20Africa.>
- World food Programme. 2023. Indonesia. Diakses pada tanggal 31 Maret 2023.